

EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2020

Muhammad Alif Hidayat Sulistiyono
NPP. 30.1355

Asdaf Kota Kendar, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: Alipleee12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP.,M.PA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Pilkada is one form of a democratic party for the community, the presence of Pilkada is the key to creating a space for community political freedom in determining the flow of development. However, in the 2020 regional head elections, there is a non-natural disaster covid-19 which has an impact on restrictions on various community activities which have implications for reducing the enthusiasm for community participation. **Purpose:** The purpose of this research is to analyze and find out how the effectiveness of the General Election Commission's performance in increasing Political Participation in the 2020 South Konawe Regency elections as well as the various obstacles and challenges it faces. **Method:** The research method used in this research is descriptive qualitative with a deductive approach. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. In this study the theory used used the theoretical basis of effectiveness by Sedarmayanti. As a tool to analyze the effectiveness of the performance of the KPU of South Konawe Regency. **Result:** The KPU has obstacles such as socialization funds, lack of orderly administration from the community, lack of maximum matching and research on the community while the driving factor of increasing political participation from the community itself is the effective and maximum performance of the General Election Commission in providing education and socialization and information about the elections to the community and this can make the 2020 elections successful. **Conclusion:** The results showed that the effectiveness of the performance of the KPU in increasing community political participation has been maximized in providing services and education to the community about the elections.

Keywords: election, effectiveness, political participation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pilkada merupakan salah satu bentuk daripada pesta demokrasi bagi masyarakat, hadirnya Pilkada menjadi kunci dari terciptanya ruang kebebasan politik masyarakat dalam menentukan alur perjalanan pembangunan. Tetapi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 sedang terjadi bencana non alam covid-19 yang berdampak terhadap pembatasan berbagai kegiatan masyarakat yang berimplikasi terhadap menurunnya semangat berpartisipasi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui bagaimana efektivitas kinerja

Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik pada pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teori yang digunakan menggunakan landasan teori efektivitas oleh Sedarmayanti. Sebagai alat analisis keefektifan kinerja KPU Kabupaten Konawe Selatan. **Hasil/Temuan:** KPU memiliki hambatan seperti ada dana sosialisasi, kurang tertibnya administrasi dari masyarakat, kurang maksimalnya pencocokan dan penelitian terhadap masyarakat sedangkan faktor pendorong dari meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat sendiri adalah dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum yang efektif serta maksimal dalam memberikan edukasi serta sosialisasi dan informasi seputar pilkada kepada masyarakat dan hal tersebut dapat menyukseskan pilkada tahun 2020. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya keefektifan kinerja dari KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sudah maksimal dalam memberikan pelayanan serta edukasi kepada masyarakat tentang pilkada.

Kata kunci: pilkada, efektivitas, partisipasi politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi yang di mana rakyat lah yang memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat sangat di butuhkan dalam kehidupan berdemokrasi karena demokrasi tak hanya berbicara tentang tujuan atau ketetapan yang di buat pemerintah. Rakyat juga berhak turut serta dalam proses pembuatan kebijakan atau ketetapan melalui aspirasinya agar Rakyat merasa mendapatkan keadilan serta rasa puas terhadap pelayanan dari Pemerintah. Sebagaimana yang terdapat didalam teks Pancasila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang kaitan dari makna tersebut adalah Pemerintah harus bersikap adil dalam menentukan kebijakan serta memikirkan dampak dari kebijakan tersebut dengan bersikap Visioner demi kepentingan rakyat agar terciptanya demokrasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat di terima oleh rakyat. Salah satu dari pengimplementasian dari nilai-nilai demokrasi yang ada pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah pemilihan umum yang merupakan pesta demokrasi bagi rakyat dalam memilih nahkoda atau pemimpin untuk memimpin pemerintahan yang akan datang. Rakyat dapat berperan aktif dalam pemilihan umum serta mendapatkan keadilan serta kebebasan dalam memilih sebagai wujud dari pengimplementasian kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan kepala daerah merupakan dasar dari perwujudan demokrasi masyarakat untuk memilih siapa yang pantas menjadi wakil rakyat yang dapat menampung aspirasi mereka. Dalam kenyataannya pilkada yang terjadi saat ini yang merupakan pemilihan di tengah pandemi menjadi suatu tantangan tersendiri dari pihak KPU dan juga masyarakat oleh sebab itu dalam pesta demokrasi kali ini harapannya kolaborasi antara KPU dan masyarakat berjalan lancar agar dalam prosesnya memberikan hasil yang maksimal dan juga masyarakat tetap aman dari covid19 dan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Demi mewujudkan hal tersebut di butuhkan dukungan moral dari masyarakat agar dapat terhindar dari situasi situasi yang tidak kondusif untuk menciptakan pesta demokrasi yang efektif, aman, serta nyaman untuk semuanya.

Pemilihan kepala daerah tak dapat terjadi dengan lancar jika tak di bantu dengan adanya partisipasi dari masyarakat, oleh karena itu betapa pentingnya Partisipasi Poltik dari masyarakat. Partisipasi politik sendiri merupakan keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat dalam suatu pemilihan yang akan menentukan nasib mereka akan di pimpin oleh siapa di masa yang akan datang (pasca pemilu). Adanya bentuk keterlibatan yang aktif terhadap pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi yang sedang

berlangsung merupakan sebuah tolak ukur yang paling mendasar dari kesuksesan serta kualitas dari pada penyelenggaraan pemilihan umum yang di dasari oleh demokrasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 agak sedikit beda dari tahun tahun sebelumnya yang di mana pada 2020 di laksanakan pemilihan serentak di seluruh Indonesia. Namun pada tahun 2020 dalam pelaksanaannya dengan kondisi yang sedang di terpa badai Covid-19 merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan pilkada ini. Status darurat Covid-19 berdampak pada pembatasan seluruh kegiatan serta aktivitas masyarakat dalam semua sector. Dalam hal ini termasuk juga pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berimplikasi pada proses pemilihan di kabupaten tersebut.

KPU dalam hal ini sebagai suatu institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pemilu baik itu eksekutif maupun legislatif di tuntutan untuk mampu memberikan jalan keluar serta memikirkan cara bagaimana untuk mengatasi hambatan yang ada di dalam pilkada tahun 2020 yang di khawatirkan akan terjadi penurunan terhadap partisipasi politik masyarakat yang di sebabkan kekhawatiran masyarakat akan terjangkit Covid19 dalam pelaksanaan pesta demokrasi bagi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan kali ini.

KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi tersebut wajib bekerja keras dalam pelaksanaan pilkada kali ini dengan tujuan jalannya pilkada kali ini yang di laksanakan serentak bisa berjalan lancar dan sukses sesuai rencana. Selain menjalankan tugas pokoknya dalam mewartahi hak pilih masyarakat, KPU juga harus mampu menjaga kesehatan jasmani setiap pemilih dan juga petugas KPU itu sendiri agar tidak menimbulkan kluster baru dari penyebaran Covid19.

Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu dari berbagai kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak. Berikut ini merupakan perbandingan tingkat persentase partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada 2015 dan 2020.

Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan	Tahun	Jumlah Pemilih (orang)	Tingkat Partisipasi
	2015	150.212	80,00%
	2020	169.974	83,57%

Sumber: KPU Kabupaten Konawe Selatan, 2020

Dari tabel tersebut bisa di lihat bagaimana tingkat partisipasi dari masyarakat Kabupaten Konawe Selatan mengalami kenaikan sebesar 3,57% hal yang di dapat di simpulkan dari tabel adalah adanya peningkatan dari partisipasi politik masyarakat kali ini walaupun di rasa kurang signifikan tetapi ini adalah suatu kemajuan serta kesuksesan KPU dalam pilkada kali ini yang di mana mendapatkan hambatan yang merupakan momok bagi seluruh dunia yaitu tentang penyebaran virus Covid19, namun hal ini tidak mengurangi kinerja dan semangat KPU sebagai institusi Negara yang bertanggung jawab menjalankan pesta demokrasi pemilu dan hal ini merupakan suatu apresiasi untuk pihak KPU karena dapat menjalankan kewajibannya dengan aman dan nyaman.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengangkat beberapa daripada penelitian sebelumnya yang memiliki alur analisis serta penelitian yang selaras untuk di jadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu peneliti mengambil serta memilih 5 (lima) penelitian untuk di jadikan pedoman dalam penulisan ini. Pertama, yaitu jurnal ilmiah dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat” karya Novianty dan Octavia (2018). Yang di mana dalam penelitian ini berisi peran apa saja yang telah di laksanakan oleh KPU dalam menggapai partisipasi politik masyarakat, utamanya di kecamatan Pontianak Barat yang sebagai lokus penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana persepsi masyarakat dengan adanya program yang di selenggarakan oleh KPU Pontianak. Kedua, jurnal ilmiah dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018” karya Hasibuan, dkk (2018). Penelitian ini mengungkapkan bagaimana strategi yang di lakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai partisipasi masyarakat yang maksimal. Lalu karya ilmiah kali ini menjelaskan beberapa kendala serta kelemahan yang di alami oleh KPU sebagai permasalahan daripada strategi tersebut. Ketiga, yaitu jurnal ilmiah dengan judul “Pengaruh Program Rumah Pintar Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan” karya Milan Alfiani Zega, dkk (2018). Penelitian ini mengangkat salah satu program yang telah di buat KPU, yaitu Rumah Pintar yang di harapkan bisa memberikan edukasi politik pada masyarakat Kota Medan demi meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Dalam penelitian ini di jelaskan apa itu pengaruh yang di rasakan oleh masyarakat pada saat mengikuti program Rumah Pintar yang di buat oleh KPU Kota Medan. Keempat, jurnal ilmiah dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia” karya Aprista Ristyawati (2020) yang membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak tersebut yang di dasari perspektif hukum. Jurnal tersebut memberikan penjelasan tentang poin poin yang dapat terjadi jika melaksanakan pilkada secara serentak. Kelima, jurnal ilmiah yang berjudul “Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 Di Kecamatan Medan Selayang” karya Frits Yoel Lubis (2021) yang membahas tentang proses pemilu di Kecamatan Medan Selayang dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Penelitian ini dapat di simpulkan dengan tingkat partisipasi masyarakat di Kota Medan yang khususnya Kecamatan Medan Selayang masih sangat rendah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, walupun konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus kepada peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ditengah pandemi covid-19 namun situasi dan kondisi lingkungan sosio kultural yang berbeda juga memberikan respon dan pendekatan yang berbeda juga dari pihak KPU. Untuk hal yang bersifat teknis terdapat perbedaan pada lokus dan waktu dari penelitian yang dilakukan oleh Milan Alfiani Zega, dkk (2018) dan Hasibuan, dkk (2018). metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang memiliki kesamaan dengan kelima penelitian terdahulu namun pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep efektivitas menurut (Sedarmayanti & Pd, 2001) dan Partisipasi Politik menurut Hebert McClosky

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik pada pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapinya.

II. METODE

Suatu penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka yang di buat dengan tujuan mencari jawaban dari pada pertanyaan penelitian (2020). Penelitian merupakan proses yang sistimatis serta teratur dalam menganalisa suatu permasalahan serta mencari jalan keluar dan atau memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian. Dalam proses penelitian metodologi penelitian menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Nursapia Harahap (2020) , menjelaskan bahwa “penelitian merupakan suatu usaha yang dikerjakan untuk pencarian data serta fakta tentang suatu hal dengan kaidah-kaidah ilmiah”.Metode yang digunakan pada penelian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan dimana penelitian kualitatif menjadi metode ilmiah yang banyak digunakan oleh sekelompok peneliti pada bidang ilmu sosial. Harahap (2020), menuturkan penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Penelitian kualitatif juga dilakukan fleksibel dan ditempatkan pada kondisi alamiah, selanjutnya penelitian ini lebih bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan partisipasi politik daripada masyarakat pada pilkada 2020 di banding pilkada 2015 lumayan signifikan yang tidak luput dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan yang efektif dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena KPU bukan hanya sebagai penyelenggara pilkada saja melainkan juga memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga educator dalam hal pendidikan pemilih, misalnya pada pelaksanaan sosialisasi yang bertujuan mengajak masyarakat agar ikut andil dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan tidak masuk dalam kelompok yang golput (golongan putih) atau yang tidak memilih. Namun di samping hal tersebut ada bahaya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, yang di mana KPU harus menjaga keberlangsungan pesta demokrasi tersebut dan juga memberikan pencegahan penularan covid-19 yang meningkat demi keselamatan masyarakat selaku pemilih. Hal tersebut dapat di jalankan dengan sukses berkat kinerja perangkat dari KPU yang efektif. Oleh karena itu, seperti yang sudah di terangkan sebelumnya penulis akan menguraikan bagaimana efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi politik pada pilkada yang berlangsung pada tahun 2020 yang lalu.

3.1. Efektivitas Pada Input

Pada saat pelaksanaan pesta demokrasi pilkada tahun 2020 Kabupaten Konawe Selatan, input pada kinerja yang efektif KPU kali ini, penulis memberikan acuan dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman informan serta beberapa dokumen pendukung dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa. Dimana bahwasannya pengadaan barang/jasa di KPU di laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendukung pelaksanaan setiap kegiatan yang di lakukan oleh setiap pegawai di KPU. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Konawe Selatan memberikan input yang maksimal kepada pegawainya dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pada setiap perangkat yang ada sehingga setiap kegiatan yang ada selalu sukses, entah itu kegiatan dalam internal ataupun eksternal dari KPU Konawe Selatan. Di mana setiap kegiatan yang di jalankan itu memerlukan fasilitas sarana dan pra-sarana serta material, maka KPU di sini selalu memberikan input yang maksimal kepada seluruh perangkat yang ada. penulis dapat memberikan analisis bahwasannya input dalam hal ini fasilitas dan material dalam meningkatkan efektivitas kinerja itu wajib di berikan oleh KPU kepada pegawainya, karena kinerja yang baik tidak akan tercipta jika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang ada.

3.2. Efektivitas Pada Proses

Proses yang di alami dalam meningkatkan kualitas kinerja yang efektif dari KPU dalam hal ini memiliki beberapa indikator kerja yaitu, komunikasi, pengambilan keputusan, serta sosialisasi menjadi beberapa contoh indikator yang menjadi acuan atau dasar dalam proses peningkatan kualitas kinerja KPU. setiap proses untuk menjadi lebih baik lagi itu tidak luput dari berbagai kekurangan, di sini KPU Konawe Selatan memberikan sistem yang di rasa sangat solutif untuk memperbaiki permasalahan yang ada di internal KPU Konawe Selatan yang di mana hal tersebut bertujuan untuk *improvement* bagi setiap pegawai yang ada dan hal tersebut terfasilitasi penuh dalam rapat pleno mingguan KPU Konawe Selatan, di mana pada rapat tersebut komunikasi yang tercipta bukan hanya satu arah antara atasan ke bawahan namun dalam sistem yang di buat oleh KPU Konawe Selatan yaitu *bottom up* bawahan juga dapat memberikan saran serta kritikan kepada atasan hingga terciptanya komunikasi yang jelas antara dua arah guna mendukung proses keefektifan kinerja yang ada.

KPU memiliki sistem yang adil dalam hal pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan yang di laksanakan oleh ketua KPU ataupun yang mewakili itu tidak langsung serta merta di putuskan semena mena, namun hal tersebut melalui berbagai proses sehingga di harapkan keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik yang tidak membebani perangkat ataupun pegawai yang ada di mana keputusan ini lah yang akan di jalankan oleh para pegawai yang ada oleh karena itu sudah seharusnya keputusan yang di buat itu keputusan yang sudah di terima oleh seluruh pegawai guna mendukung setiap proses yang ada.

Pada KPU proses sangat di hargai guna meningkatkan kualitas kerja. Hal ini di buktikan dengan wawancara di atas di mana Ketua KPU sebagai atasan serta perangkat lain yang mewakili selalu mengingatkan bawahannya terkait dengan proses kinerja mereka melalui sosialisasi di mana tidak ada seorangpun manusia yang sempurna. Maka dari itu sebagai bentuk penghargaan terhadap proses meningkatkan kinerja KPU Konawe Selatan selalu memberikan kegiatan sosial yaitu sosialisasi dalam rapat mingguan untuk bertukar pendapat serta saran untuk membangun peningkatan kualitas pada KPU Konawe Selatan agar menjadi lebih baik lagi dan lagi

3.3. Efektivitas Pada Hasil

Pada setiap jalannya proses kegiatan pasti akan memiliki hasil akhir, dan tolak ukur dari keberhasilan dalam hasil berbeda beda pada tiap tiap individu, tapi pada dasarnya jika dalam proses suatu kegiatan ataupun pekerjaan itu di lakukan dengan kinerja dan ambisi yang maksimal pasti akan menghasilkan hasil seperti produk ataupun jasa yang maksimal dan masyarakat akan puas terhadap hasil kinerja dan pelayanan dari KPU sendiri. dalam setiap pekerjaan yang di lakukan oleh seluruh perangkat/pegawai KPU itu memiliki target masing masing yang harus di laksanakan dengan maksimal demi membuahkan hasil yang maksimal, serta setiap target yang di laksanakan itu di buat secara sistematis berupa tahapan tahapan, dan hal ini berguna agar tidak ada pekerjaan yang luput ataupun terlewat daripada pegawai yang ada karena hal tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil yang akan di capai.

Terkait target yang di maksudkan diatas dapat jelaskan pada PKPU RI No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di mana dijelaskan didalamnya ada beberapa target yang menjadi tugas dari KPU Konawe Selatan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang di masukkan dalam program sosialisasi KPU tersebut Adapun program sosialisasi yang target-target pelaksanaan pemilihan kepala daerah Konawe Selatan 2020 adalah sebagai berikut:

Kolaborasi, Sosialisasi merupakan salah satu tugas dari KPU seperti yang telah di jelaskan pada PKPU NO. 10 tahun 2018 di atas namun terkait sosialisasi ada beberapa mitra daripada KPU dalam menjalankan target kali ini di mana KPU berkolaborasi dengan Bawaslu sebagai mitra penyelenggara,

Partai Politik sebagai peserta Pilkada, Pemerintah, Akademisi, Lembaga, dan Organisasi masyarakat yang menjadi beberapa elemen yang bermitra dengan KPU dalam hal mencapai peningkatan partisipasi politik dalam hal edukasi kepada masyarakat dan menarik minat masyarakat dalam pilkada. Edukasi, Partisipasi tidak hanya menitikberatkan kepada jumlah angka pemilih yang datang ke TPS. Tetapi dalam proses pesta demokrasi 5 tahun sekali ini agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di inisiatif oleh KPU untuk memberikan edukasi terkait politik dan pentingnya partisipasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti bahwasannya mereka berpartisipasi dalam politik dan tongkat estafet pemerintahan ada di tangan serta hak pilih mereka masing masing. Informasi Target selanjutnya yaitu tentang perluasan informasi di mana Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar pemukimannya masih berada di pelosok sehingga pada target program kali ini KPU Konawe Selatan berusaha memberikan informasi semaksimal mungkin kepada masyarakat yang tinggal di pelosok terkait pentingnya partisipasi politik mereka dalam pilkada untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini. Dari Program yang menjadi target daripada KPU Konawe Selatan di atas dapat di lihat bahwasannya guna mendukung keefektifan kinerja untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di susun target-target kerja yang sistematis untuk mengajak masyarakat agar memahami apa itu politik serta pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada 2020. Dan juga agar pekerjaan setiap pegawai selalu terarah dalam melaksanakan target dan tidak melampaui batas daripada kewenangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Konawe Selatan.

3.4. Efektivitas Pada Produktifitas

Setelah beberapa dimensi sebelumnya yaitu tentang input, proses, dan hasil. Produktifitas merupakan salah satu hal yang tidak kalah pentingnya daripada ketiga dimensi sebelumnya di mana produktifitas dari pegawai yang ada dapat menentukan bagaimana jalannya setiap pekerjaan. Produktifitas merupakan salah satu faktor yang mendasar yang menentukan kualitas daripada pegawai dalam bekerja di dunia kerja. Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Dari peraturan sekjen KPU di atas di jelaskan tentang sistematika pemberian Tunjangan Kinerja daripada pegawai Komisi Pemilihan Umum yang di mana pemberian tunjangan tersebut harus selaras dengan kinerja dari tiap tiap pegawai dari Komisi Pemilihan Umum. Hal ini juga di perjelas dengan wawancara oleh Ketua KPU Konawe Selatan. Dalam hal ini menyangkut kesejahteraan ekonomi pegawai maka di dalam KPU Konawe selatan juga tingkat kesesuaian dari pendapatan pendapatannya sudah di atur oleh pemerintah di mana hal tersebut di sampaikan langsung oleh pak Aliudin, S.IP selaku ketua KPU Konawe Selatan.

penulis dapat menyampaikan bahwasannya lagi dan lagi dari segi penghasilan yang di terima oleh setiap pegawai KPU itu sudah di atur langsung oleh pemerintah pusat hingga terciptanya kesesuaian pendapatan dan menghasilkan kinerja yang baik, di mana pendapatan tersebut di katakan dapat memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi pegawai pegawai yang ada dan membuat perangkat yang ada tetap fokus dalam bekerja melayani masyarakat

3.5. Keikutsertaan Dalam Partisipasi Politik

Pada suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2020 itu di tentukan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan di mana masyarakat di harapkan dapat berpartisipasi penuh dalam melaksanakan pemilihan dan tidak ada yang tergabung kedalam golongan putih (golput) sehingga penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan lancar. indikator partisipasi

masyarakat terhadap kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keputusan politik dan hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19). Di mana dari peraturan tersebut di lihat pada masyarakat yang tetap patuh pada kebijakan pemerintah tentang proses pemilihan pada saat bencana pandemi, serta hal tersebut tidak mengurangi keikutsertaan mereka karena mereka sadar dan paham seberapa pentingnya hak suara dari setiap individu.

Pada saat pemilihan 2020 dapat di lihat tingkat partisipasi dari masyarakat itu meningkat di bandingkan dengan tahun 2015 yang di mana ini semua berkat kerja keras KPU mensosialisasikan tentang pentingnya hak pilih seseorang dan menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk memilih. Namun tak bisa di pungkiri bahwasannya pihak ketiga (partai politik) di sini juga berpengaruh besar dalam meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. KPU sudah sangat berperan aktif dalam pengembangan edukasi kepada masyarakat dalam hal pentingnya peningkatan partisipasi dari masyarakat namun ada juga pihak lain seperti partai politik yang mengadakan sosialisasi ataupun kampanye untuk menarik minat masyarakat dalam melaksanakan pemilihan agar tidak ada masyarakat yang malas untuk pergi melaksanakan pemilihan dan hal ini terbukti efektif karena pada saat pemilihan jika di bandingkan dengan tahun 2015, pemilihan tahun 2020 ini mengalami kenaikan partisipasi politik yang cukup signifikan dari masyarakat.

3.6. Faktor Penghambat Terjadinya Kenaikan Partisipasi Masyarakat

KPU dalam pelaksanaannya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pilkada di antaranya: Dana yang seharusnya di gunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta mendukung proses pilkada, dipangkas untuk memfokuskan covid-19. Sehingga banyak anggota yang langsung turun ke lapangan, seperti PPK, PPS, dan KPPS mengeluh dimana beban kerja tidak seimbang dengan perencanaan kerja sebelumnya. Sehingga banyak anggota yang kurang fokus dalam bekerja di sebabkan beban kerja yang meningkat dan dana yang kurang. Belum tertibnya administrasi. Hal ini di temukan di dokumen KPU terhadap pilkada tahun 2020, masih ada pemilih ganda, masyarakat yang belum punya identitas KTP, serta banyak masyarakat yang berpindah domisili dan tidak melapor. Hal ini di sampaikan langsung Ketua KPU di ruangan kerjanya (16 Januari 2023): “ waktu itu jumlah pemilihnya banyak (ada) tapi orangnya sudah tidak ada nah ternyata setelah di cari tahu dengan berkoordinasi kepada pihak Dukcapil ada beberapa warga yang berpindah domisili tanpa mengurus administrasi kependudukan...”. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang kurang maksimal di laksanakan karena banyak masyarakat yang tidak dapat di temui saat pencocokan dan penelitian, karena ada saja masyarakat yang sedang bekerja di kebun ataupun tidak ada di lokasi dan tidak tahu kapan kembali, dan juga ada beberapa masyarakat yang lupa dengan gambaran tentang pilkada 2020 yang lalu.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 lalu, karena partisipasi dari masyarakat dapat menentukan keberhasilan dalam pilkada yang sedang berlangsung di mana masyarakat di sini harus memiliki kepatuhan kepada peraturan yang di berikan oleh pemerintah yang tidak lain adalah untuk kesuksesan jalannya pesta demokrasi. tingkat partisipasi yang signifikan terjadi juga karena faktor patuhnya masyarakat kepada setiap keputusan yang di buat daripada pemerintah, dalam hal ini masyarakat memikirkan bahwa keputusan yang di buat itu memang untuk pelayanan terhadap mereka dan juga kebaikan bersama guna menjaga kesehatan serta jalannya

proses pergantian kepemimpinan di Kabupaten Konawe Selatan. Dari kepatuhan tersebut di mana masyarakat selalu menerima setiap keputusan yang di berikan oleh pemerintah dan tidak ada yang melakukan intervensi karena keputusan yang di buat sudah di pikirkan dengan matang dan juga untuk kebaikan bersama

KPU dalam pelaksanaannya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pilkada, layaknya temuan Milan Alfiani Zega,dkk (2018) dimana masih terkendala dalam beberapa hal seperti Dana yang seharusnya di gunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta mendukung proses pilkada, dipangkas untuk memfokuskan covid-19. Sehingga banyak anggota yang langsung turun ke lapangan, seperti PPK, PPS, dan KPPS mengeluh dimana beban kerja tidak seimbang dengan perencanaan kerja sebelumnya. Sehingga banyak anggota yang kurang fokus dalam bekerja di sebabkan beban kerja yang meningkat dan dana yang kurang. Selain dana, hal lain yang menjadi faktor dalam menghambat tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada adalah permasalahan Belum tertibnya administrasi. Hal ini di temukan di dokumen KPU terhadap pilkada tahun 2020, masih ada pemilih ganda, masyarakat yang belum punya identitas KTP, serta banyak masyarakat yang berpindah domisili dan tidak melapor. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ketika pelaksanaan Pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang kurang maksimal di laksanakan karena banyak masyarakat yang tidak dapat di temui saat pencocokan dan penelitian, karena ada saja masyarakat yang sedang bekerja di kebun ataupun tidak ada di lokasi dan tidak tahu kapan kembali. Karena fokus penelitian ini dilakukan dengan berfokus kepada Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga lokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2020) yang memfokuskan penelitian secara nasional bukan berfokus pada suatu daerah tertentu yang lebih spesifik.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat terdapat pada alokasi Dana yang seharusnya di gunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta mendukung proses pilkada, dipangkas untuk memfokuskan covid-19. Sehingga banyak anggota yang langsung turun ke lapangan, seperti PPK, PPS, dan KPPS mengeluh dimana beban kerja tidak seimbang dengan perencanaan kerja sebelumnya. Sehingga banyak anggota yang kurang fokus dalam bekerja di sebabkan beban kerja yang meningkat dan dana yang kurang..

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kefektivitasan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe Selatan terkhusus dalam meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dan hal tersebut di dukung dengan kualitas serta kinerja yang maksimal daripada setiap perangkat atau pegawai dari KPU Konawe Selatan dalam memberikan pelayanan serta mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya pilkada kepada masyarakat tentang agar masyarakat sadar serta paham bahwasannya hak pilih dari masing-masing mereka itu sangat penting. Dan hal tersebut berjalan dengan sukses dengan meningkatnya partisipasi dari masyarakat pada pilkada tahun 2020. Ada beberapa faktor penghambat daripada Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pada pilkada tahun 2020 yaitu tentang banyaknya dana yang di pangkas karena pada saat itu sedang terjadi pandemi covid-19 dimana dana yang seharusnya di gunakan untuk melaksanakan sosialisasi serta pendukung proses pilkada harus di alihfokuskan untuk covid-19, dan juga belum tertibnya administrasi dari masyarakat dalam hal ini adanya masyarakat yang memiliki hak pilih ganda, ada juga yang belum memiliki KTP, serta ada juga yang berpindah domisili tetapi tidak melapor, serta kurang maksimalnya pencocokan

dan penelitian terhadap masyarakat di karenakan banyak kendala serta kurangnya keterangan dan informasi dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian yang sangat terbatas sehingga informan yang dapat dimintai keterangan masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak faktor yang dapat digali dalam melihat perkembangan partisipasi masyarakat, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di Komisi Pemilihan Umum dengan lebih berfokus kepada tingkah laku dan kondisi sosio kultural yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.

Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *PERSPEKTIF*, 7(1), 1–5.

Lubis, F. Y. L. (2021). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Selayang*. Universitas Sumatera Utara.

Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293–303.

Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepidol*, 2(2), 85–96.

Sedarmayanti, M., & Pd, M. (2001). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. *Bandung: CV. Mandar Maju*.

Zega, M. A., Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2018). Pengaruh Program Rumah Pintar Pemilu terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 7(2), 60–65.